

Nama: Dwi Intan Rahmadani

NPM: 2213031048

Kelas: 2022 B

1. Penyebab kegagalan Making Indonesia 4.0

Implementasi Making Indonesia 4.0 belum berhasil mendorong pertumbuhan industri prioritas karena masih lemahnya struktur industri nasional, terutama tingginya ketergantungan pada bahan baku dan komponen impor sehingga nilai tambah domestik tidak meningkat. Investasi asing yang masuk juga cenderung fokus pada aktivitas perakitan tanpa transfer teknologi yang kuat, sehingga tidak menciptakan *spillover* ke pemasok lokal. Selain itu, infrastruktur digital dan logistik yang belum memadai meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing sektor manufaktur Indonesia dibanding pesaing seperti Vietnam. Kesiapan SDM dan kemampuan adopsi teknologi juga masih rendah, membuat banyak perusahaan belum mampu menerapkan teknologi Industri 4.0 secara optimal. Ditambah lagi, koordinasi kebijakan antar lembaga dan insentif yang kurang berbasis kinerja membuat program tidak berjalan secara konsisten di lapangan.

2. Perbandingan dengan Vietnam dan Korea Selatan

Kebijakan industri Indonesia berbeda dari Vietnam dan Korea Selatan dalam hal fokus dan konsistensi implementasinya. Vietnam berhasil menarik investasi besar karena menawarkan regulasi yang lebih sederhana, kawasan industri yang terintegrasi, dan biaya logistik yang lebih rendah. Sementara itu, Korea Selatan menggunakan pendekatan negara pembangunan (*developmental state*) di mana pemerintah secara aktif memilih sektor unggulan, mendukung industri melalui kredit dan proteksi selektif, serta mewajibkan perusahaan memenuhi target ekspor dan inovasi. Perbedaan inti terletak pada efektivitas koordinasi dan penekanan pada pembangunan kapabilitas domestik. Indonesia memiliki visi yang baik, tetapi belum mampu memastikan transfer teknologi, penguatan pemasok lokal, dan peningkatan kualitas SDM seperti yang dilakukan kedua negara tersebut.

3. Kebijakan alternatif yang lebih sesuai untuk Indonesia

Kebijakan industri yang lebih cocok bagi Indonesia harus menekankan penguatan kapabilitas nasional, bukan sekadar menarik investasi. Pemerintah perlu membangun klaster industri yang lengkap dari hulu hingga hilir, serta menjadikan insentif fiskal bersyarat pada peningkatan kandungan lokal, transfer teknologi, dan R&D bersama. Program pengembangan pemasok lokal harus diperkuat agar UMKM industri mampu

masuk rantai pasok perusahaan besar. Selain itu, peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan teknologi perlu dipercepat untuk menyiapkan tenaga kerja terampil. Perbaikan infrastruktur logistik dan digital harus diprioritaskan agar biaya produksi lebih kompetitif. Dengan koordinasi k deindustrialisasi dini dan memperkuat kembali basis manufakturnya. ebijakan yang lebih terpadu dan berorientasi pada hasil, Indonesia dapat keluar dari jebakan